

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin & Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dessy Eko Prayitno dkk, 2013. *Modul Bagi Badan Publik: Melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Indonesian Center for Enviromental Law.

Dhoho A. Sastro dkk, 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Jimly Asshiddiqie, 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.

Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 2003. *Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka Cetakan II*. Jakarta: USAID.

Kristian Erdianto dkk, 2012. *Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik Indonesia*. Jakarta : Center for Law and Democracy.



Lilin Budiati, 2014, *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mas Achmad Santosa, 2001. *Good governance dan hukum lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Nurul Qamar, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sedarmayanti, 2000, *Good Governance , Pemerintahan yang baik, Bagian Dua*. Bandung: Mandar Maju.

-----, 2012, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik) bagian ketiga edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknis Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

### **C. Jurnal**

Astim Riyanto, *Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.3, 2012.

Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara Das Sein dan Das Sollen)*, Perspektif Volume XVII No. 1, 2012.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, LAN dan BPKP, 2000.

Kadek Cahya Susila Wibawa, *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 2 Juni 2019.

Nasrullah Nasir, *Good Governance*, Mediator Volume 4 No. 1, 2003.

Nunuk Febrianingsih, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan*

*Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, Rechtsvinding Volume 1

No.1, April 2012.

#### **D. Website**

<https://komisiinformasi.sumbarprov.go.id/home/pages/1>.

<https://bimtekdiklatnasional.com/artikel-bimtek/pengertian-bimtekbimbingan-teknis>.

